



Peran Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo dalam Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kerja di Bagian Keuangan

Serlinda Apsari¹, Wahyuni Dwi Anggraini²,

Diana Pramudyawardhani³

Universitas Muhammadiyah Ponorogo ^{1,2,3}

e-mail: serlindaapsari@gmail.com

Abstract

The Secretariat of the Regional House of Representatives (DPRD) of Ponorogo Regency plays an important role in supporting effective and accountable regional financial management through efforts to improve the competence of employees in the finance division. This study aims to examine the role of the DPRD Secretariat of Ponorogo Regency in enhancing the competence of finance division employees and to identify the challenges encountered in this process. This research employed a qualitative approach with a descriptive research design, using observation, interviews, and documentation as data collection techniques conducted during the research period. The results indicate that the DPRD Secretariat of Ponorogo Regency contributes to financial administration and management and supports the supervisory function of the DPRD. Although the competence of employees in the finance division is considered adequate, continuous human resource development remains necessary. The main challenges include limited training budgets and time constraints, as well as increasing demands for technological proficiency. Therefore, improving employee competence in the finance division is essential to support the effectiveness of regional financial management.

Keywords: Workforce Competence, Financial Management, Competency Development.

Abstrak

Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo memiliki peran penting dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan akuntabel melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja di bagian keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja di bagian keuangan serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi selama pelaksanaan magang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo berperan dalam memfasilitasi administrasi dan pengelolaan keuangan serta mendukung fungsi pengawasan DPRD, sementara kompetensi tenaga kerja di bagian keuangan tergolong cukup baik namun masih perlu ditingkatkan melalui pengembangan sumber daya manusia secara berkelanjutan. Tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan anggaran dan waktu pelatihan serta tuntutan penguasaan teknologi. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi tenaga kerja di bagian keuangan menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Kata Kunci: Kompetensi Tenaga Kerja, Pengelolaan Keuangan, Pengembangan Kompetensi.

PENDAHULUAN

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan elemen strategis dalam sistem pemerintahan daerah karena berfungsi sebagai penopang utama kelancaran tugas dan fungsi legislatif. Melalui perannya dalam pengelolaan administrasi kesekretariatan dan keuangan, sekretariat DPRD berkontribusi langsung terhadap terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten menjadi prasyarat penting, terutama pada bagian keuangan yang memiliki peran krusial dalam pengelolaan anggaran daerah dan pertanggungjawaban fiskal (Mardiasmo, 2018).

Kompetensi pegawai, yang mencakup aspek pengetahuan teknis, keterampilan, dan sikap profesional, menentukan kualitas pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan di lingkungan sekretariat DPRD. Pegawai pada bagian keuangan dituntut untuk memahami regulasi pengelolaan keuangan daerah, menyusun laporan keuangan secara akurat, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan sistem administrasi berbasis teknologi. Penguatan kompetensi SDM di bidang keuangan tidak hanya berpengaruh pada kualitas pengelolaan anggaran, tetapi juga mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap penggunaan keuangan daerah (Halim & Kusufi, 2019).

Sekretariat DPRD memiliki tanggung jawab institusional dalam mengembangkan kompetensi pegawai melalui berbagai upaya, seperti pendidikan dan pelatihan, pembinaan berkelanjutan, serta penciptaan lingkungan kerja yang mendorong profesionalisme. Pengembangan kompetensi tersebut menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya kompleksitas administrasi keuangan daerah dan tuntutan penerapan prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan (Sedarmayanti, 2017). Tanpa dukungan SDM yang memadai, fungsi administratif dan keuangan sekretariat DPRD berpotensi tidak berjalan optimal. Sejumlah penelitian terdahulu menegaskan bahwa peran sekretariat, khususnya kepemimpinan Sekretaris DPRD, berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kompetensi pegawai. Galih et al. (2023) menunjukkan bahwa strategi pengembangan SDM melalui pelatihan, mentoring, dan fasilitasi pengembangan kapasitas mampu meningkatkan kemampuan teknis dan inovasi pegawai dalam menjalankan tugasnya. Sementara itu, Wulandari dan Aisyah (2023) menekankan bahwa efektivitas perencanaan dan pengelolaan anggaran di bagian keuangan sangat bergantung pada kualitas dan kompetensi sumber daya manusianya.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai peran Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja di bagian keuangan menjadi relevan untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana sekretariat DPRD

menjalankan perannya dalam pengembangan kompetensi pegawai serta tantangan yang dihadapi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah serta mendukung pencapaian tujuan organisasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk menggali secara mendalam mengenai peran Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja di bagian keuangan, serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam proses peningkatan kompetensi tersebut. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis dan faktual mengenai fenomena yang terjadi, dengan fokus pada upaya-upaya yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan kerja pegawai di bagian keuangan.

PEMBAHASAN

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Pilar Tata Kelola Pemerintahan

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena berkaitan langsung dengan penggunaan sumber daya publik untuk kepentingan masyarakat. Proses ini mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban anggaran yang harus dilaksanakan secara sistematis, transparan, dan akuntabel. Penerapan prinsip-prinsip tersebut menjadi tuntutan utama dalam era otonomi daerah, di mana pemerintah daerah memiliki kewenangan luas dalam mengelola keuangan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah (Mardiasmo, 2018).

Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Pegawai yang memiliki kompetensi memadai akan mampu memahami regulasi keuangan daerah, menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan, serta menjalankan mekanisme pengendalian internal secara efektif. Andini (2016) membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yang pada akhirnya mencerminkan tingkat akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan publik. Dengan demikian, kompetensi SDM tidak dapat dipisahkan dari upaya peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah.

Peran Strategis Sekretariat DPRD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Sekretariat DPRD memegang peran strategis sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD tidak hanya berperan dalam administrasi kesekretariatan, tetapi juga memiliki tanggung jawab penting dalam pengelolaan administrasi keuangan yang berkaitan dengan

kegiatan legislatif. Peran ini mencakup fasilitasi penyusunan anggaran DPRD, pengelolaan belanja operasional, serta penyediaan data dan informasi keuangan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD (Halim & Kusufi, 2019). Penelitian Wulandari dan Aisyah (2023) menegaskan bahwa bagian keuangan Sekretariat DPRD berperan sebagai penghubung antara kebijakan legislatif dan implementasi administratif dalam pengelolaan anggaran. Kinerja bagian keuangan yang baik akan mendukung kelancaran program kerja DPRD serta memastikan bahwa penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Efektivitas peran Sekretariat DPRD dalam pengelolaan keuangan daerah sangat bergantung pada kompetensi tenaga kerja yang menjalankan fungsi tersebut.

Kompetensi Tenaga Kerja di Bagian Keuangan Sekretariat DPRD

Kompetensi tenaga kerja di bagian keuangan mencerminkan kemampuan pegawai dalam mengintegrasikan pengetahuan teknis, keterampilan administratif, serta sikap profesional dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan. Kompetensi ini meliputi pemahaman terhadap regulasi keuangan daerah, kemampuan menyusun dan menganalisis anggaran, serta kecakapan dalam menggunakan sistem informasi keuangan berbasis teknologi. Pegawai yang kompeten akan mampu menjalankan tugas secara akurat dan bertanggung jawab, sehingga meminimalkan risiko kesalahan administrasi maupun penyimpangan anggaran (Sedarmayanti, 2017). Penelitian Galih et al. (2023) menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD dapat dicapai melalui pembinaan berkelanjutan, pelatihan teknis, serta peran aktif pimpinan dalam mendorong pengembangan kapasitas pegawai. Kepemimpinan yang mendukung pembelajaran dan inovasi akan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi peningkatan kompetensi, khususnya di bagian keuangan yang memiliki beban tanggung jawab tinggi.

Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai Upaya Peningkatan Kompetensi

Pengembangan sumber daya manusia merupakan strategi utama dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja di bagian keuangan Sekretariat DPRD. Program pengembangan SDM dapat dilakukan melalui pendidikan formal, pelatihan teknis, bimbingan kerja, serta peningkatan kapasitas berbasis pengalaman kerja. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, pelatihan mengenai standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi informasi keuangan menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan (Halim & Kusufi, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan (2020) menunjukkan bahwa kompetensi SDM dan penerapan sistem pengendalian internal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Temuan ini menegaskan bahwa pengembangan SDM harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan agar mampu menjawab tuntutan peningkatan akuntabilitas

publik. Dengan SDM yang kompeten, Sekretariat DPRD dapat menjalankan fungsi administrasi keuangan secara lebih efektif dan profesional.

Tantangan dalam Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Bagian Keuangan

Meskipun pengembangan kompetensi tenaga kerja merupakan kebutuhan mendesak, implementasinya di lingkungan Sekretariat DPRD masih menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan anggaran pelatihan sering menjadi kendala utama dalam penyelenggaraan program pengembangan SDM. Selain itu, keterbatasan waktu akibat beban kerja yang tinggi juga menghambat pegawai untuk mengikuti pelatihan secara optimal. Tantangan lainnya adalah tuntutan penguasaan teknologi informasi yang terus berkembang, sementara tidak semua pegawai memiliki latar belakang atau kemampuan yang sama dalam bidang tersebut. Penelitian Tampongango (2021) mengungkapkan bahwa keterbatasan sumber daya dan minimnya pelatihan teknis menjadi faktor penghambat utama dalam peningkatan kapasitas SDM di lingkungan Sekretariat DPRD. Kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas pengelolaan keuangan apabila tidak diantisipasi dengan kebijakan pengembangan SDM yang adaptif. Oleh karena itu, diperlukan komitmen organisasi dan dukungan kebijakan yang kuat untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut.

Hubungan Kompetensi SDM dengan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Kompetensi SDM memiliki hubungan yang erat dengan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Pegawai yang kompeten akan mampu menerapkan standar akuntansi pemerintahan, menyusun laporan keuangan yang andal, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas publik. Hartati dan Dewi (2024) menyatakan bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. Peningkatan kompetensi tenaga kerja di bagian keuangan tidak hanya berdampak pada kualitas administrasi keuangan, tetapi juga memperkuat fungsi pengawasan DPRD terhadap penggunaan anggaran daerah. Dengan demikian, pengembangan kompetensi SDM menjadi investasi strategis yang mendukung terciptanya tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo berperan strategis dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel melalui pelaksanaan fungsi administrasi dan keuangan. Kompetensi tenaga kerja di bagian keuangan tergolong cukup baik dan berkontribusi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan, meskipun masih memerlukan peningkatan berkelanjutan. Pengembangan sumber daya manusia telah dilakukan, namun belum optimal akibat keterbatasan anggaran, waktu, dan tuntutan penguasaan

teknologi. Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo perlu meningkatkan pengembangan kompetensi tenaga kerja di bagian keuangan secara berkelanjutan melalui pelatihan teknis dan penguatan pemahaman sistem keuangan daerah. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan kajian agar memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Andini, D. (2016) 'Pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah', *Jurnal Akuntansi Publik*, 8(2), pp. 45–58.
- Galih, A., Prasetyo, B., & Nugroho, R. (2023). Peran kepemimpinan Sekretaris DPRD dalam meningkatkan kompetensi aparatur sekretariat. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(2), 145–158.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2019). Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Hartati, S. and Dewi, R. (2024) 'Kompetensi sumber daya manusia dan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah', *Jurnal Keuangan Daerah*, 12(1), pp. 21–34.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2020) Kajian kompetensi SDM dan sistem pengendalian intern pemerintah daerah. Jakarta: Kemenkeu RI.
- Mardiasmo. (2018). Otonomi dan manajemen keuangan daerah. Yogyakarta: Andi.
- Sedarmayanti. (2017). Manajemen sumber daya manusia: Reformasi birokrasi dan manajemen pegawai negeri sipil. Bandung: Refika Aditama.
- Tampongangoy, D. (2021) 'Pengembangan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan sekretariat DPRD', *Jurnal Administrasi Pemerintahan*, 9(1), pp. 67–79.
- Wulandari, S., & Aisyah, N. (2023). Kompetensi sumber daya manusia dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Keuangan dan Administrasi Publik*, 11(1), 33–45.